

**DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK INDONESIA
TAHUN 1995-2021**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

FAISHAL FADHIL ABDULAH

B300180083

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK INDONESIA TAHUN 1995-2021

PUBLIKASI ILMIAH

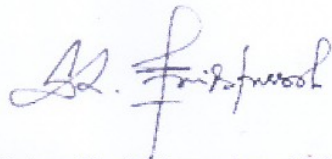
Oleh :

FAISHAL FADHIL ABDULAH

B300180083

Telah diperiksa dan disetujui oleh

Dosen Pembimbing



Sitti Retno Faridatussalam, SE., MM.

NIK/ NIDN. 0609087401

HALAMAN PENGESAHAN

DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK INDONESIA TAHUN 1995-2021

Oleh:

FAISHAL FADHIL ABDULAH

B300180083

Telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

1. Sitti Retno Farudatussalam, SE., MM.

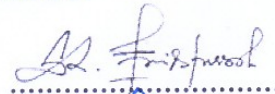
(Ketua Dewan Penguji)

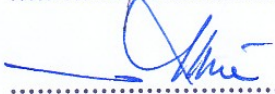
2. Muhammad Arif, SE., M.Ec.Dev.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Daryono Soebagiyo, M.Ec.

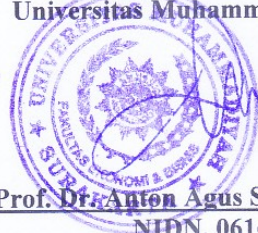
(Anggota II Dewan Penguji)







Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, SE., M.Si.
NIDN. 0616087402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Februari 2023

Yang menyatakan



Faishal Fadhil Abdulah
B300180083

DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK INDONESIA TAHUN 1995-2021

Abstrak

Perpajakan merupakan variabel penting dalam perekonomian di suatu negara. Pajak yang masuk ke dalam kas penerimaan negara akan dipergunakan untuk melakukan pembangunan dan berbagai belanja pemerintah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh jumlah angkatan kerja, utang luar negeri, dan keterbukaan perdagangan terhadap penerimaan pajak Indonesia tahun 1995 sampai dengan 2021 menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak nasional, sedangkan utang luar negeri berpengaruh negatif terhadap pos penerimaan pajak Indonesia selama tahun 1995 sampai dengan 2021. Sementara itu, keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh terhadap total penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas para angkatan kerja dengan pelatihan atau meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan nasional. Harapannya angkatan kerja tersebut akan memiliki kemampuan khusus yang dapat mengantarkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpenghasilan lebih layak lagi, sehingga mereka akan dapat memberikan kontribusi positif melalui pos penerimaan pajak pendapatan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah perlu mengkaji ulang lagi mengenai kebijakan utang luar negeri yang dilakukan agar tidak membebani pengeluaran di masa yang akan datang.

Kata Kunci: pajak, angkatan kerja, utang luar negeri, keterbukaan perdagangan

Abstract

Taxation is an important variable in the economy of a country. Taxes that enter the state revenue treasury will be used to carry out development and various other government expenditures. This study aims to estimate the effect of the number of labor force, foreign debt, and trade openness on Indonesia's tax revenues from 1995 to 2021 using Ordinary Least Square (OLS) regression analysis. The results in the study show that the number of the workforce has a positive effect on national tax revenues, while foreign debt has a negative effect on Indonesia's tax revenues from 1995 to 2021. Meanwhile, trade openness has no effect on total tax revenues. Based on the results of this study, the government is expected to improve the quality of the workforce by training or increasing development in the national education sector. The hope is that the workforce will have special abilities that can lead them to get good jobs and earn more decently, so that they will be able to make a positive contribution through the post of labor income tax receipts. In addition, the government needs to re-examine the foreign debt policy that is being carried out so as not to burden spending in the future.

Keywords: taxes, labor force, foreign debt, trade openness

1. PENDAHULUAN

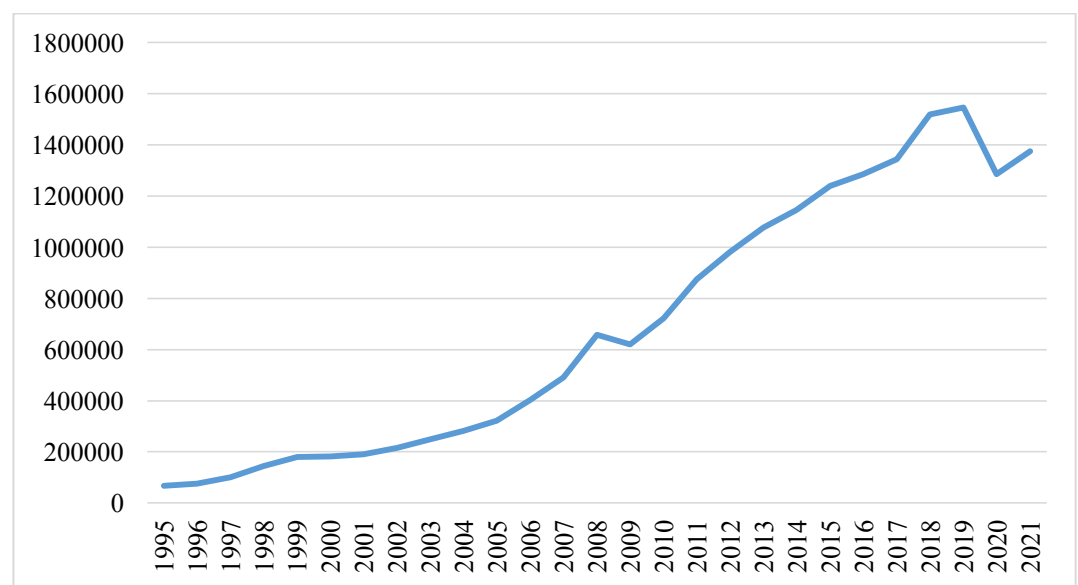
Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian upaya pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2015). Pemerintah akan selalu berupaya untuk meningkatkan beberapa variabel-variabel penting dalam perekonomian di suatu wilayah ataupun secara nasional. Fasilitas pendidikan dan kesehatan merupakan fokus utama selain tingkat pendapatan riil masyarakat. Ketiga komponen dalam masyarakat tersebut ditujukan agar kegiatan perekonomian dapat meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai (Syahputra, 2020). Menurut Hidayat & Nalle (2017), segala kegiatan pembangunan tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian, pemerintah Indonesia akan selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak nasional agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut.

Amin et al. (2014), menjelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib terhadap kas negara yang ditunjukkan untuk membayar pengeluaran pemerintah. Sementara, Sari (2020) berpendapat bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pajak dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pajak langsung yang dibayarkan langsung oleh individu dan pajak sifatnya tidak langsung yang dikumpulkan perantara dan disetorkan ke pemerintah seperti pajak penjualan barang-barang konsumsi (Mishkin, 2012).

Kementrian Keuangan (2021), dalam laporannya menekankan pentingnya pajak sebagai instrumen pembiayaan dalam APBN. Kemenkeu juga melaporkan bahwa pada tahun 2021, jumlah penerimaan pajak mencapai 1.231,87 triliun rupiah. Nilai tersebut tumbuh sebesar 19,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini juga menandakan pemulihan ekonomi nasional berjalan dengan baik serta sesuai target pemerintah pasca krisis ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19.

Berdasarkan Grafik 1, Badan Pusat Statistik (2022) melaporkan bahwa total penerimaan pajak Indonesia selama kurun waktu 1995-2021 cenderung meningkat di setiap tahunnya. Akan tetapi, dari laporan tersebut terlihat bahwa

kondisi perekonomian nasional sangat rentan terhadap krisis ekonomi, utamanya pada krisis ekonomi secara global seperti di tahun 2008 dan krisis ekonomi yang melanda dunia akibat pandemi Covid-19. Terlihat di tahun 2009 penerimaan pajak nasional turun menjadi 619.922 miliar rupiah. Angka tersebut turun sebesar 38.779 miliar rupiah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Serupa dengan hal tersebut, pada tahun 2020 penerimaan pajak nasional hanya sebesar 1.285.136 miliar rupiah. Nilai tersebut turun 261.006 miliar rupiah dari tahun 2019.



Gambar 1. Grafik Total Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 1995-2020 (Miliar Rupiah)
Sumber: *World Bank*

Penerimaan pajak dapat dipengaruhi beberapa variabel makro ekonomi lainnya, seperti jumlah angkatan kerja dalam suatu negara. Yunita & Sentosa (2019) berpendapat bahwa tingginya angkatan kerja merupakan aset bagi negara, para angkatan kerja tersebut merupakan ujung tombak dalam melaksanakan segala pembangunan infrastruktur yang berguna bagi perekonomian nasional. Selain itu, jika semakin banyak angkatan kerja yang memiliki pekerjaan tetap bertambah, maka pos penerimaan pajak juga dapat meningkat melalui pajak pendapatan yang dibayarkan oleh para tenaga kerja tersebut (Parwa and Yasa, 2019).

Ridho (2015) menyatakan bahwa keperluan dana yang digunakan untuk pembangunan ekonomi juga dapat dipenuhi dengan pinjaman luar negeri. Utang yang dilakukan pemerintah dapat secara langsung menyediakan kekurangan dana

pembangunan serta dapat mempercepat pembangunan nasional, sehingga dampak dari pembangunan tersebut dapat segera dirasakan masyarakat maupun suatu sistem perekonomian. Dengan demikian, jika utang luar negeri naik, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan segera dapat tercapai dan penerimaan pajak pemerintah pun juga dapat meningkat (Yasin, 2020).

Faktor terakhir yang diduga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah keterbukaan perdagangan yang merupakan interpretasi dari total nilai ekspor ditambah impor terhadap PDB nasional. Salvatore (2014) menyatakan bahwa naiknya volume ekspor maupun impor dapat menjadi tolak ukur meningkatnya perekonomian. Semakin tinggi ekspor juga mengindikasikan produk nasional sangat diminati di pasar internasional dan pajak dari perdagangan internasional tersebut juga akan masuk ke dalam penerimaan negara. Sementara itu, naiknya aktivitas impor akan selaras dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, jika keterbukaan perdagangan meningkat, maka pos penerimaan pajak nasional juga bertambah dan tentunya penerimaan pajak juga akan naik (Sartika, Ulfa and Ilyas, 2019).

Mebratu et al., (2020) melakukan penelitian di negara-negara Sub-Sahara Afrika selama tahun 2000-2018 dengan regresi data panel. Hasil pada model terpilih yaitu adalah *Fixed Effects* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, dan pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan koefisien regresi pada tiap variabelnya sebesar 0,1022; 0,1815; dan 0,1934 serta signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,0000 ($< 0,01$); 0,0000 ($< 0,01$); dan 0,0000 ($< 0,01$). Sementara itu, utang luar negeri tidak berpengaruh terhadap pajak karena memiliki signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,8244 ($> 0,10$).

Al-Own dan Bani-Khalid (2021) menganalisis penerimaan pajak di 28 negara di Eropa selama tahun 2011-2017 dengan menggunakan pendekatan *Random Effects*. Hasilnya menyatakan bahwa keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan masing-masing koefisien 0,0115 dan 0,0026 serta signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,0180 ($< 0,05$) dan 0,0224 ($< 0,05$). Sementara itu, pengeluaran pemerintah dan inflasi

ditemukan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena memiliki signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,2540 ($> 0,10$) dan 0,1510 ($> 0,10$).

Mudiyanselage, et al. (2020) melakukan penelitian di *Lower Middle Income Countries* (LMICs) selama tahun 1990-2014, dengan pendekatan *Fixed Effects* menemukan bahwa impor dan jumlah angkatan kerja berpengaruh terhadap penerimaan pajak di LMICs dengan masing-masing koefisien regresi sebesar 0,106 dan 0,389 serta signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,039 ($< 0,05$) dan 0,081 ($< 0,10$). Sementara itu, variabel ekspor dan utang luar negeri tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena memiliki signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,291 ($> 0,10$) dan 0,140 ($> 0,10$).

Saibu (2013) dengan menggunakan alat analisis *Error Correction Model* (ECM) menemukan bahwa dalam jangka pendek, keterbukaan perdagangan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Nigeria selama tahun 1970-2011 dengan koefisien regresi sebesar 0,3728 serta signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,0014 ($< 0,10$), sedangkan utang luar negeri tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan signifikansi empirik (ρ) t sebesar -0,4362 ($> 0,10$). Sementara dalam jangka panjang, kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,1217 dan 0,4129 serta signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,0014 ($< 0,01$) dan 0,0000 ($< 0,01$).

2. METODE

Untuk menganalisis arah dan besarnya pengaruh mengestimasi arah dan besarnya pengaruh jumlah angkatan kerja, utang luar negeri, dan keterbukaan perdagangan terhadap penerimaan pajak Indonesia tahun 1995-2021. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS) dengan persamaan sebagai berikut:

$$\log TAX_t = \beta_0 + \beta_1 \log AK_{it} + \beta_2 \log DEBT_t + \beta_3 TO_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

di mana TAX adalah total penerimaan pajak Indonesia, AK merupakan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih, DEBT adalah total utang luar negeri pemerintah, dan TO adalah keterbukaan

perdagangan yaitu rasio dari total nilai ekspor ditambah dengan impor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Persamaan model ekonometrik yang digunakan merupakan hasil modifikasi dari artikel Mudiyansele, et al. (2020), di mana variabel rasio ekspor dan impor nasional terhadap PDB dijadikan satu dalam satu variabel keterbukaan perdagangan dan ditambahkan pula variabel jumlah angkatan kerja agar surplus jumlah angkatan kerja di Indonesia dapat dianalisis pengaruhnya terhadap penerimaan pajak nasional.

Penelitian ini akan melalui beberapa tahapan estimasi model ekonometrik antara lain estimasi parameter model ekonometrik dengan metode OLS. Kemudian dilakukan deteksi pelanggaran Gauss-Markov asumsi klasik yang meliputi deteksi multikolinieritas, deteksi normalitas residual, deteksi heteroskedastisitas, deteksi autokorelasi, uji kebaikan model, dan uji validitas pengaruh variabel independen.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu selama tahun 1995-2021, yang meliputi data penerimaan pajak, jumlah angkatan kerja, utang luar negeri, dan keterbukaan perdagangan Indonesia. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometri

$\widehat{\log TAX_t} = -144,367 + 9,747 \log AK_t - 0,893 \log DEBT_t + 0,002 TO_t$
(0,000)* (0,003)* (0,633)
$R^2 = 0,965; DW = 0,432; F \text{ statistic} = 212,239; \text{Prob. } F = 0,000$
Deteksi Pelanggaran Asumsi Gauss-Markov
(1) Multikolinieritas (<i>VIF</i>)
$\log(AK) = 9,606; \log(DEBT) = 9,254; TO = 2,153$
(2) Normalitas Residual (Jarque-Bera)
$JB(2) = 2,533; \text{Prob. } JB(2) = 0,281$
(3) Autokorelasi (Breusch-Godfrey)
$\chi^2(3) = 17,254; \text{Prob. } \chi^2(3) = 0,001$
(4) Heteroskedastisitas (White)
$\chi^2(7) = 10,766; \text{Prob. } \chi^2(7) = 0,149$

Sumber: Hasil Olahan *EViews*

Deteksi Pelanggaran Asumsi Gauss-Markov dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa VIF semua variabel independen nilainya < 10 ; sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model ini tidak terdapat multikolinearitas yang serius. Sementara itu, nilai probabilitas statistik JB adalah sebesar $0,281 (> 0,10)$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual model terestimasi terdistribusi normal. Pada uji autokorelasi terlihat bahwa probabilitas χ^2 uji BG sebesar $0,001 (< 0,10)$; sehingga diketahui terdapat autokorelasi dalam model terestimasi. Deteksi pelanggaran asumsi Gauss-Markov yang terakhir memperlihatkan nilai probabilitas statistik χ^2 Uji White adalah sebesar $0,149 (> 0,10)$; sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model.

Hasil Uji eksistensi model (Uji F) memperlihatkan model yang digunakan eksis karena memiliki probabilitas empirik statistik F sebesar $0,000 (< 0,01)$. Dengandemikian, secara bersama-sama angkatan kerja, utang luar negeri dan keterbukaan perdagangan berpengaruh terhadap penerimaan pajak Indonesia tahun 1995-2021. Sementara itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,965$; artinya $96,5\%$ variasi penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh angkatan kerja, utang luar negeri dan keterbukaan perdagangan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Pengaruh

Variabel	Koefisien	Prob. t	Kriteria	Kesimpulan
Log(AK)	$\widehat{\beta}_1$	0,000	$< 0,01$	$\widehat{\beta}_1$ terbukti nyata pada $\alpha = 0,01$
Log(DEBT)	$\widehat{\beta}_2$	0,003	$< 0,01$	$\widehat{\beta}_2$ terbukti nyata pada $\alpha = 0,01$
TO	$\widehat{\beta}_3$	0,633	$> 0,10$	$\widehat{\beta}_3$ tidak terbukti nyata

Sumber: Tabel 1

Berdasarkan Tabel 2, jumlah angkatan kerja dan utang luar negeri memiliki probabilitas empirik t di bawah (α) yaitu sebesar $0,000 (< 0,01)$ dan $0,003 (< 0,01)$, sehingga dapat disimpulkan jumlah angkatan kerja dan utang luar negeri berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena memiliki probabilitas empirik t di atas (α) sebesar $0,633 (> 0,10)$.

Jumlah angkatan kerja memiliki koefisien regresi sebesar $9,747$. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Artinya, jika jumlah angkatan kerja naik sebesar 1%, maka penerimaan pajak juga akan naik sebesar 9,75% karena keduanya memiliki pola hubungan logaritma-logaritma. Sebaliknya, jika jumlah angkatan kerja turun sebesar 1%, maka total penerimaan pajak nasional juga akan turun sebesar 9,75%.

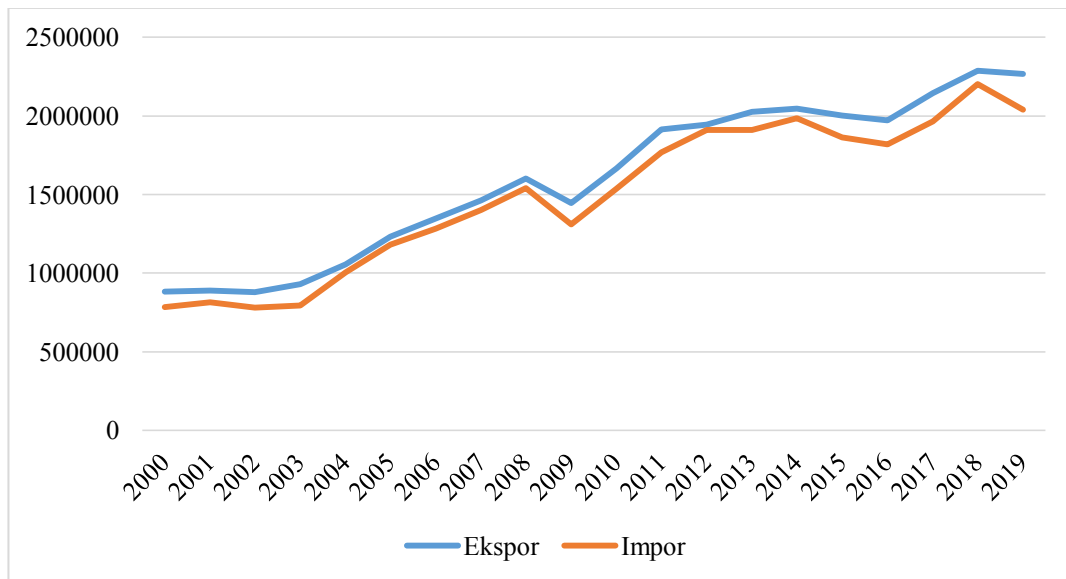
Variabel utang luar negeri memiliki koefisien yang bertanda negatif, yaitu sebesar -0,893. Artinya, utang luar negeri berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Kenaikan utang luar negeri sebesar 1% akan menurunkan penerimaan pajak sebesar 0,89%. Begitu pula sebaliknya, jika utang luar negeri turun sebesar 1%, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,89%. Pola hubungan antara utang luar negeri dan penerimaan pajak adalah logaritma-logaritma.

Hasil uji validitas pengaruh (uji *t*) menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Indonesia tahun 1995-2021. Angkatan kerja yang melimpah dan kebanyakan pada usia produktif merupakan modal utama dalam perekonomian Indonesia. Para angkatan kerja tersebut mampu menggerakkan roda pembangunan utamanya dalam bidang infrastruktur yang sangat diperlukan oleh suatu perekonomian. Selain itu, para angkatan kerja tersebut juga akan menambah sumber penerimaan pajak nasional melalui pajak pendapatan jika sudah mendapatkan upah. Lebih lanjut, mereka juga membelanjakan upahnya dan penerimaan pajak juga datang dari kegiatan konsumsi yang mereka lakukan. Hasil penelitian ini mendukung temuan Yunita dan Sentosa (2019) yang menyatakan bahwa naiknya angkatan kerja di Indonesia mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak.

Utang luar negeri ditemukan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak Indonesia selama tahun 1995-2021. Hal ini disebabkan oleh beban bunga pembayaran utang di masa lampau akan mengambil dari pendapatan nasional, salah satunya dari penerimaan pajak. Utang luar negeri yang dilakukan juga dapat menurunkan pendapatan dan penerimaan pajak karena dalam prosesnya banyak sekali kesepakatan yang dimasukan, seperti China yang memberikan pinjaman dana tetapi memasukan tenaga kerja dari negaranya dalam melaksanakan

pembangunan infrastruktur nasional, sehingga tenaga kerja Indonesia terpinggirkan dan mereka tidak mampu membayar pajak, sehingga kebijakan utang luar negeri perlu dikaji ulang agar utang tersebut mampu menunjang perekonomian dan meningkatkan penerimaan pajak Indonesia. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan Siahaan (2020) yang menemukan pengaruh negatif dari meningkatnya utang luar negeri terhadap penerimaan pajak karena menurunnya perekonomian akibat Covid-19.

Hasil uji t dalam penelitian ini menyatakan keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak nasional selama tahun 1995-2021. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya indeks keterbukaan perdagangan Indonesia pada kurun waktu tersebut. Selain itu, total nilai impor nasional juga masih cukup tinggi, terlihat pada Grafik 1 yang memperlihatkan neraca perdagangan Indonesia di mana tingginya aktivitas ekspor juga hampir sejalan juga dengan semakin meningkatnya impor produk dari luar negeri, sehingga masih banyak konsumsi yang bergantung dari barang asing. Akibatnya, industri dalam negeri sulit untuk bersaing dan para pelaku industri maupun tenaga kerjanya pasti akan semakin rendah kontribusinya terhadap pos penerimaan pajak nasional. Hasil serupa ditemukan Keskin dan Kara (2021) di mana keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi Turki.



Gambar 2. Grafik Nilai Ekspor-Impor Indonesia (Miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

4. PENUTUP

Pajak adalah komponen penting bagi suatu bangsa. Peningkatan sumber-sumber penerimaan pajak akan selalu diusahakan oleh pemerintahnya. Pajak berguna untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam upayanya mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan besarnya jumlah angkatan kerja, utang luar negeri, dan keterbukaan perdagangan terhadap penerimaan pajak Indonesia tahun 1995-2021 dengan menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS).

Hasil analisis hasil regresi menyatakan bahwa jumlah angkatan kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan utang luar negeri berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, sedangkan keterbukaan perdagangan ditemukan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dengan hasil tersebut, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui pembangunan disektor pendidikan dan kesehatan, sehingga produktivitas dan output produksi secara nasional juga naik. Harapannya pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan pos penerimaan pajak juga akan naik. Selain itu, pemerintah perlu mengkaji ulang atas kebijakan utang luar negeri yang dilakukan Indonesia

agar kedepannya mampu mendorong perekonomian dan meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Own, B. and Bani-Khalid, T. (2021) 'Financial Inclusion and Tax Revenue: Evidence From Europe', *International Journal of Financial Research*, 12(2), pp. 27–42. doi: 10.5430/ijfr.v12n2p27.
- Alamirew Mebratu, A., Leykun, F. and Lakehal-Ayat, M. (2020) 'Determinant of Tax Revenue Effort in Sub-Saharan African Countries: A Stochastic Frontier Analysis', *International Journal of Sustainable Development & World Policy*, 9(1), pp. 47–71. doi: 10.18488/journal.26.2020.91.47.71.
- Amin, A. *et al.* (2014) 'Factors Affecting Tax Collection in Pakistan: An Empirical Investigation', *Journal of Finance and Economics*, 2(5), pp. 149–155. doi: 10.12691/jfe-2-5-3.
- Hena, E. (2021) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing di Indonesia', *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), pp. 446–453. doi: 10.52362/jisamar.v5i2.
- Hidayat, A. S. and Nalle, F. W. (2017) 'Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), pp. 71–79. doi: 10.22219/jep.v15i1.4647.
- Keskin, A. and Kara, B. (2021) 'The Relationship Between Trade Openness , Foreign Trade Tax Revenues and GDP in Turkey : ARDL Bounds Test Approach for 1993-2019 Period Türkiye ' de Ticari Açıklık , Dış Ticaret Vergi Gelirleri ve GSYH Arasındaki İlişki : 1993 -2019 Dönemi için ARDL Sınır Testi Yaklaşımı Abdulkadir Keskin - Berat Kara', 16(4), pp. 1297–1315.
- Lutfi, A. F. *et al.* (2020) 'Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus 4 Negara di ASEAN (Impact Corruption on Economic Growth : A Case Study of 4 Countries in ASEAN)', 7(1), pp. 30–35.
- Mudiyanselage, H. K., Chen, S. and Rammohan, A. (2020) 'Tax Effort in Developing Countries : Where is Sri Lanka?', *Journal of Tax Administration*, 6(1), pp. 162–187.
- Parwa, I. G. N. J. L. A. and Yasa, I. G. W. M. (2019) 'Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Bali', *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas UDAYANA*, 8(5), pp. 945–973.

- Pratiwi, N. M., AR, M. D. and Azizah, D. F. (2015) ‘Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, dan Nilai Tukar terhadap Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2013)’, *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 26(2), p. 86310.
- Ridho, M. (2015) ‘Pengaruh Ekspor , Hutang Luar Negeri dan Kurs terhadap Cadangan Devisa Indonesia’, *E-Jurnal Perdagangan, Industri, dan Moneter*, 3(1), pp. 1–9. Available at: <https://online-journal.unja.ac.id/pim/article/view/3987/8527>.
- Saibu, O. M. (2013) ‘Macroeconomic Determinants of Tax Revenue in Nigeria (1970-2011)’, *World Applied Sciences Journal*, 28(1), pp. 27–35. doi: 10.5829/idosi.wasj.2013.28.01.1189.
- Sari, D. P. (2020) ‘Persepsi Wajib Pajak terhadap Citra Perpajakan Indonesia Setelah Fenomena Kasus Korupsi Pajak’, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen*, 27(1), pp. 15–28.
- Sartika, D., Ulfa, A. and Ilyas, A. (2019) ‘Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat’, *Jurnal ekonomi & bisnis dharma andalas*, 21(1), pp. 32–53.
- Siahaan, A. L. S. (2020) ‘Tax Incentives and Its Influences on National Financial Resilience in the Times of the COVID-19 Still in Indonesia’, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(2), pp. 73–82.
- Syahputra, R. (2020) ‘Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia’, *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(3), pp. 169–176. doi: 10.36407/serambi.v2i3.207.
- Yasin, M. (2020) ‘Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur’, *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), pp. 465–472. doi: 10.31539/costing.v3i2.1161.
- Yunita, M. and Sentosa, S. U. (2019) ‘Pengaruh Pajak, Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia’, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), p. 533. doi: 10.24036/jkep.v1i2.6265.